KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Provinsi Riau

Nomor Registrasi: 14-220654-2025

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sinergitas Tata Kelola Aspek Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Berbasis Platform Digital Terhadap Peningkatan Kinerja (SIAP KERJA)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (iga2021-DPMPTSP.provinsi.riau)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

ASN

1.5. Nama Inisiator

ADE FIRDAUS, S.Kom., M.IP

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.8. Asta Cita

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

Kepegawaian

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dasar Hukum Inovasi

> Inovasi SIAP KERJA (Sinergitas Tata Kelola Aspek Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Berbasis Platform Digital terhadap Peningkatan Kinerja) merupakan inovasi digital yang dikembangkan untuk mentransformasikan tata kelola administrasi pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau. Pengembangan inovasi dilakukan melalui penyusunan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bagian dari tahapan pengembangan dan implementasi platform digital sesuai dengan kebutuhan organisasi. **Dasar hukum pelaksanaan inovasi SIAP KERJA** berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, manajemen Aparatur Sipil Negara, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tingkat daerah, inovasi SIAP KERJA didukung antara lain oleh **Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Riau; Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025–2026; Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara; serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau**.

Keseluruhan regulasi tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan SIAP KERJA sebagai inovasi tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan **perencanaan, penganggaran/keuangan, data dan manajemen kepegawaian, serta pengukuran kinerja melalui pemanfaatan teknologi digital**, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kinerja

Permasalahan

Tata kelola administrasi internal pada Sekretariat DPMPTSP Provinsi Riau masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain proses administrasi yang masih didominasi secara

manual, penggunaan dokumen fisik, proses validasi yang dilakukan secara berjenjang, serta belum terintegrasinya data perencanaan, keuangan dan kepegawaian. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya proses pelayanan administrasi, tingginya risiko kesalahan administrasi serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan.

Isu Strategis

Isu strategis yang menjadi dasar pengembangan SIAP KERJA adalah perlunya transformasi digital dalam tata kelola administrasi internal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Integrasi data dan proses administrasi pada aspek perencanaan, keuangan dan kepegawaian diperlukan untuk mendukung tersedianya informasi yang akurat, mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Metode Pembaharuan

Pembaharuan dilakukan melalui transformasi proses administrasi internal dengan membangun platform digital terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan administrasi Sekretariat DPMPTSP dalam satu sistem. Tahapan pembaharuan diawali dengan identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan pengguna, pembentukan tim efektif, penyusunan regulasi dan SOP, serta pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya dilakukan uji coba, penyempurnaan sistem, sosialisasi, pelatihan kepada operator dan pengguna, serta implementasi secara bertahap. Sistem juga memanfaatkan tanda tangan elektronik, notifikasi otomatis melalui WhatsApp, penyimpanan data secara terpusat, monitoring real time dan dashboard pelaporan.

Keunggulan dan Kebaruan

Keunggulan SIAP KERJA terletak pada integrasi layanan administrasi perencanaan, keuangan dan kepegawaian dalam satu platform digital. Pada tahap awal, platform menyediakan layanan **e-Kenaikan Gaji Berkala (e-KGB), e-Cuti, e-Model C, dan e-Realisasi Fisik, Keuangan dan Kinerja (e-RFKK)**. Sistem dilengkapi dengan tanda tangan elektronik, notifikasi otomatis melalui WhatsApp, penyimpanan data secara terpusat, monitoring real time dan dashboard pelaporan. Kebaruan inovasi terletak pada pengintegrasian berbagai proses administrasi sekretariat yang sebelumnya dilakukan secara manual ke dalam satu platform digital, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, akuntabel dan terdokumentasi dengan baik.

Tahapan Inovasi/Penggunaan Aplikasi/Spesifikasi Inovasi

Tahapan pengembangan SIAP KERJA meliputi: **(1) identifikasi permasalahan; (2) analisis kebutuhan pengguna; (3) pembentukan tim efektif; (4) penyusunan regulasi dan SOP; (5) pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan organisasi; (6) uji coba dan penyempurnaan sistem; (7) sosialisasi dan pelatihan operator serta pengguna; dan (8) implementasi secara bertahap.** Pada tahap awal, platform menyediakan layanan **e-KGB, e-Cuti, e-Model C dan e-RFKK**. Pada tahap pengembangan selanjutnya direncanakan penambahan modul **e-Slip Gaji, e-SKAK, e-Pangkat/Pensiun, e-Sarana Prasarana, e-Agenda, e-Surat Peringatan, e-Arsip dan e-SKPP**. Sistem didukung tanda tangan elektronik, notifikasi otomatis melalui WhatsApp, penyimpanan data terpusat, monitoring real time dan dashboard pelaporan. Implementasi inovasi juga didukung

kolaborasi pimpinan organisasi, tim efektif, pejabat fungsional, operator aplikasi, tim teknologi informasi dan perangkat daerah terkait, serta peningkatan kapasitas SDM melalui coaching, mentoring, learning community dan pelatihan.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi SIAP KERJA adalah mewujudkan tata kelola administrasi perencanaan, keuangan, dan kepegawaian yang terintegrasi melalui platform digital sehingga mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat DPMPTSP Provinsi Riau. Selain itu, inovasi ini bertujuan mempercepat proses layanan administrasi, menyediakan data yang akurat dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan, meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Pelaksanaan inovasi SIAP KERJA memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- Meningkatkan efisiensi proses administrasi melalui digitalisasi pelayanan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- Mempercepat proses pengajuan cuti, kenaikan gaji berkala, Model C, serta pelaporan realisasi fisik, keuangan, dan kinerja.
- Mengurangi penggunaan dokumen fisik sehingga mendukung tata kelola administrasi yang ramah lingkungan.
- Menyediakan data yang terintegrasi dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi.
- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan adaptasi terhadap budaya kerja digital.
- Mendukung monitoring dan evaluasi kinerja secara real time.
- Meningkatkan kualitas pelayanan internal sehingga pegawai dapat lebih fokus mendukung pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku usaha.

1.13. Hasil Inovasi

Hasil implementasi inovasi SIAP KERJA adalah tersedianya sebuah platform digital yang mengintegrasikan layanan administrasi perencanaan, keuangan, dan kepegawaian pada Sekretariat DPMPTSP Provinsi Riau. Inovasi ini menghasilkan digitalisasi layanan e-KGB, e-Cuti, e-Model C, dan e-RFKK, lengkap dengan SOP, regulasi pendukung, operator aplikasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Implementasi sistem telah meningkatkan kecepatan pelayanan administrasi, mengurangi proses manual dan penggunaan dokumen fisik, meningkatkan ketepatan data, mempercepat penyampaian informasi kepada pimpinan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi. Selain menghasilkan aplikasi, inovasi ini juga meningkatkan kapasitas SDM

melalui pelatihan, coaching, mentoring, dan learning community sehingga terbentuk budaya kerja yang adaptif terhadap transformasi digital.

Dalam jangka panjang, SIAP KERJA diarahkan menjadi platform administrasi terintegrasi yang terus dikembangkan dengan penambahan berbagai modul layanan, integrasi dengan aplikasi pemerintah lainnya, serta pemanfaatan teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

26-11-2025

1.15. Waktu Implementasi

27-11-2025

1.16. Anggaran

/storage_bskdn_4/2026/A/provinsi/2026/08/06/provinsi-2026-08-06-iga2021_dpmptsp_provinsi_riau-daf2144e.pdf

1.17. Profil Bisnis

/storage_bskdn_4/2026/A/provinsi/2026/08/06/provinsi-2026-08-06-iga2021_dpmptsp_provinsi_riau-6df96182.pdf

1.18. Dokumen HAKI

/storage_bskdn_4/2026/A/provinsi/2026/08/06/provinsi-2026-08-06-iga2021_dpmptsp_provinsi_riau-e5d63960.pdf

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

0.5165090846856712, 101.44589942527656

1.21. Kematangan

81.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• APLIKASI SIAP KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SIAP KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
			TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	Lebih dari 30	• NOTULEN DAN DOKUMENTASI PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF • UNDANGAN PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF DAN SK TIM EFEKTIF • PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF APLIKASI SIAP KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	• PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• beranda siapkerja
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek/training/TOT)	• SERTIFIKAT • SK PEMBENTUKAN OPERATOR APLIKASI SIAP KERJA • PELAKSANAAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA KOORDINASI ANTAR TIM TERKAIT INOVASI • PELAKSANAAN COACHING LEARNING COMMUNICTY UNTUK CAPACITY BUILDING
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	• Tim Pelaksana Efektim SIAP KERJA
8.	Replikasi	Tidak Dapat Diukur	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	• VIDEO APLIKASI • MANUAL BOOK
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK	• SK PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
		Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• KEMUDAHAN LAYANAN
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• SS Chat barantum • 20260821233126BALASAN PERMINTAAN PPID GEBBY
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• FGD DAN SOSIALISASI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT DENGAN APLIKASI SIAPKERJA
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• SK SOP SIAPKERJA
15.	Layanan Terintegrasi	0	• Halaman login • Aplikasi siap kerja
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• Laporan siap kerja
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	• Laporan SKP terhadap Siapkerja
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	• LAUNCHING DAN SOSIALISASI APLIKASI SIAPKERJA
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• Video inovasi siap kerja
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	Cakupan penerima manfaat 1-200 orang	• Survey kepuasan pengguna aplikasi
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang	-	Tidak Tersedia

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
	dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi		
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	-	Tidak Tersedia